



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SUMEDANG
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumedang pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumedang pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SUMEDANG PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumedang pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 1 Sumedang adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Sumedang pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumedang.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Sumedang meliputi:
 - a. jasa dan produk informatika;
 - b. produk PLTS dan lampu LED;
 - c. produk pengelasan;

- d. pentas dan *workshop* seni; dan
 - e. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

BAB II

PENARIKAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 1 Sumedang selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 1 Sumedang selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.

- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 1 Sumedang.

BAB IV

PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 1 Sumedang selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

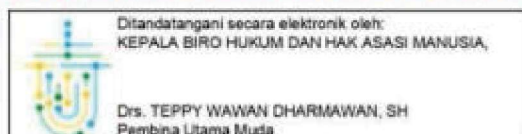
SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 67 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 SUMEDANG PADA DINAS
PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT.

TARIF LAYANAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 1 Sumedang

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	Pemasangan dan maintenance jaringan komputer dan internet :			
	Pemasangan Jaringan Komputer	1 titik	Rp50.000,00	
	Maintenance PC	1 PC	Rp50.000,00 s/d Rp200.000,00	Sesuai jenis kerusakan (tidak termasuk alat atau bahan)
	Maintenance jaringan komputer dan internet	1 titik	Rp30.000,00 s/d Rp50.000,00	Sesuai jenis kerusakan (tidak termasuk alat atau bahan)
	Pemasangan jaringan internet 20 MB	1 x	Rp500.000,00	Sudah termasuk alat
	Tarif layanan internet 20MB	Per bulan	Rp280.000,00	
2	Pembuatan desain grafis	1 desain	Rp30.000,00 s/d Rp100.000,00	Sesuai pesanan

3	Pembuatan Content Creator	1 content	Rp50.000,00 s/d Rp500.000,00	Sesuai pesanan
4	Editing video	1 video	Rp100.000,00 s/d Rp1.000.000,00	Sesuai pesanan
5	Pembuatan program aplikasi :			
	a. Aplikasi Website (CI, Laravel)	1 project	Rp200.000,00 s/d Rp2.000.000,00	Sesuai kompleksitas
	b. Aplikasi Berbasis Desktop	1 project	Rp200.000,00 s/d Rp2.000.000,00	Sesuai kompleksitas
	c. Aplikasi berbasis UiUx	1 project	Rp200.000,00 s/d Rp2.000.000,00	Sesuai kompleksitas
6	Lampu LED :			
	a. Lampu LED 5 Watt	1 pcs	Rp13.000,00	
	b. Lampu LED 9 Watt	1 pcs	Rp18.000,00	
	c. Lampu LED 12 Watt	1 pcs	Rp20.000,00	
	d. Lampu LED 15 Watt	1 pcs	Rp25.000,00	
7	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)			
	a. Paket PLTS 1 (Penerangan DC 12 V)	1 set	Rp3.500.000,00	
	- Panel Surya 120 Wp			
	- SCC PWM 20 Ampere			
	- Baterai 65 Ah			
	- Lampu DC 12 V 4 buah 10 W			
	- Saklar			
	- Box Panel 30 x 20 x 15 cm			
	- Kabel (NYMHy 2x0,75mm ² 15 m dan NYMHy 2x1,5 mm ² 5 m)			
	- MC-4			

<p>b. Paket PLTS 2 (Penerangan DC 12 V dan Tenaga 500 W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panel Surya 2 x 120 Wp - SCC PWM 30 Ampere - Baterai 120 Ah - Inverter MSW 500 W - Lampu DC 12 V 4 buah 10 W - Saklar - Stop Kontak - Box Panel 40 x 30 x 17 cm - Kabel (NYMHy 2x0,75 mm² 15 m dan NYMHy 2x2,5 mm² 5 m) - MCB AC 2 Ampere - MC-4 	1 set	Rp6.500.000,00	
<p>c. Paket PLTS 3 (Penerangan AC 220 Volt dan Tenaga 1000 W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panel Surya 3 x 120 Wp - SCC PWM 30 Ampere - Baterai 2 x 100 Ah - Inverter PSW 1000 W - Lampu AC 220 Volt 4 buah 9 W - Saklar - Stop Kontak - Box Panel 50 x 40 x 17 cm - Kabel (NYMHy 2x0,75 mm² 15 m dan NYMHy 2x2,5 mm² 5 m dan NYAF 6 mm 2 m) - MCB AC 4 Ampere - MCB DC 6 Ampere - MC-4 	1 set	Rp10.000.000,00	
<p>d. Paket PJU PLTS 60 Watt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panel Surya 120 Wp - Baterai 100 Ah - Box Panel Outdoor - SCC 20 A 	1 set	Rp12.000.000,00	

	- Kabel Lampu NYHY 2 x 1,5 mm ² - Kabel Baterai - Kabel PV - Tiang 7 meter - Base Plate 30 x 30 angkur 16 mm			
8	Produk pengelasan :			
	a. Teralis Jendela	1 m ²	Rp300.000,00 - Rp350.000,00	menyesuaikan model dan bahan yang digunakan
	b. Pagar Teralis	1 m ²	Rp400.000,00 - Rp500.000,00	menyesuaikan model dan bahan yang digunakan
	c. Pintu Teralis	1 m ²	Rp300.000,00 - Rp400.000,00	menyesuaikan model dan bahan yang digunakan
	d. Rak Bunga	1 buah	Rp100.000,00 - Rp350.000,00	menyesuaikan model dan bahan yang digunakan
	e. Jasa Pengelasan	1 hari	Rp150.000,00	jasa perakitan dan pengelasan (belum termasuk bahan)
9	a. Jasa pentas seni :			
	Upacara adat mapanganten			
	Paket A Gurudugan Set	1 paket	Rp4.000.000,00	
	Paket B Rerenggongan Set	1 paket	Rp5.000.000,00	
	Paket C Lalamba Set	1 paket	Rp8.000.000,00	
	b. Jasa Pelatihan Seni			
	Paket pelatihan Pupuh bagi guru + paket pupuh	1 paket	Rp250.000,00	Sertifikat peserta + paket CD Pupuh
	Paket pelatihan Pupuh bagi guru	1 paket	Rp150.000,00	Sertifikat

Paketpelatihan/workshop alat music karawitan (perorangan)	1 paket	Rp80.000,00	1 x 2 jam
Paketpelatihan/workshop alat music karawitan (kolektif)	1 paket	Rp150.000,00	1 x 6 jam
c. CD pupuh	1 paket	Rp110.000,00	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL